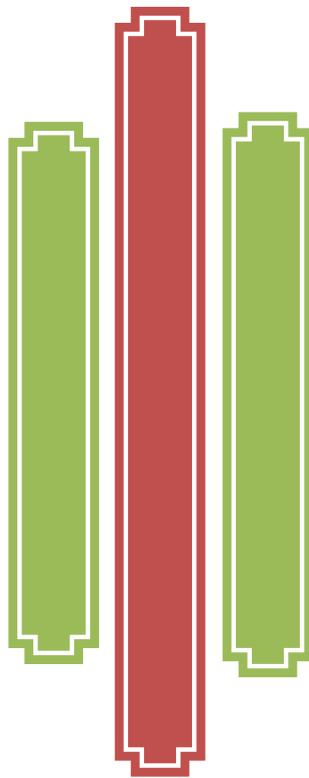




**RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019**



**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Agar hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 disusun sebagai salah satu aktivitas untuk meningkatkan kapasitas Biro Umum selaku unit kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Biro Umum serta pengendalian kegiatan (monitoring dan evaluasi) sebagai umpan balik (*feed back*) perencanaan berikutnya. Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan rencana kerja (RENJA). Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk menjembatani antara berbagai sumberdaya yang ada guna kemajuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum ini masih belum menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan, namun ke depannya akan diupayakan secara lebih baik. Oleh karena itu, saran yang dapat menyempurnakan Rencana Kerja ini sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Palangka Raya, Januari 2018

PLT. KEPALA BIRO UMUM,

AGUS PRAMONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610817 198603 1 034

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang paling tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Di samping itu juga merupakan fungsi organik manajemen yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga perencana dan selanjutnya diikuti oleh fungsi-fungsi organik lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya daerah, baik administrasi, institusi maupun keuangan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Melihat perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Tujuannya untuk kesinambungan pembangunan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (*performance based budgeting*) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD. Rencana Kerja SKPD tersebut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejauh ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rancangan RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Untuk operasional rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD di tetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran operasional Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan RENJA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Masalah atau kendala yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta dimana pengalokasiannya;
- b. Tujuan apa saja yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas apa untuk mewujudkannya serta
- d. Kebijakan apa untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

1.2 Landasan Hukum.

Beberapa produk perundangan yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/81/VII/Bapp tanggal 04 Februari 2016 tentang Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah untuk :

- a. Dasar dalam penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA-SKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.
- b. Meningkatkan kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan.
- c. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 -2021 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan.

Cara Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM TAHUN 2017.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Tahun 2017.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Biro Umum.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2019.
- 4.2 Sumber Pendanaan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Tahun 2017.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Hasil rencana program & kegiatan

Evaluasi kinerja tahun 2017 merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2017. Tujuan evaluasi kinerja RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 antara lain untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam penyusunan RENJA tahun 2019. Selain itu, evaluasi kinerja tahun 2017 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPDP Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 telah melaksanakan 10 (sepuluh) program dan kegiatan. Terhadap masing-masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp 16.615.986.775,-.

Indikator programnya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang prima. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.



- 5) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah .
- 6) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- 7) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 8) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 11) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 12) Penyediaan makanan dan minuman.
- 13) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 14) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- 15) Pembinaan Non PNS.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 91,16% atau sebesar Rp 15.146.466.889,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 35.803.725.225,-

Indikator programnya adalah meningkatnya kinerja aparatur dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional.
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas.
- 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Pengadaan meubelair.
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan dinas.
- 10) Pemeliharaan rutin berkala / peralatan gedung kantor.
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir.
- 12) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan.
- 13) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 93,09% atau sebesar Rp 33.328.252.747,-

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp 712.730.000,-

Indikator programnya adalah meningkatnya disiplin aparatur. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 91,03% atau sebesar Rp 648.817.958,-

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp 225.000.000,-

Indikator programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 89,95% atau sebesar Rp 202.380.409,-

5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan anggaran sebesar Rp 274.750.000,-.

Indikator programnya adalah meningkatnya transparansi dan efektifitas pengelolaan keuangan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 92,62% atau sebesar Rp 254.479.350,-

6. **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Daerah** dengan anggaran sebesar Rp 385.260.000,-.

Indikator programnya adalah terselenggaranya Pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah.
- 2) Penyusunan KIB BI dan KIR.



Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 85,39% atau sebesar Rp 328.963.532,-

7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.148.100.000,-.

Indikator programnya adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1) Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
- 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga / pemerintah non departemen / luar negeri.
- 3) Rapat koordinasi unsur Muspida.
- 4) Kunjungan kerja / inpeksi kepala daerah / wakil kepala daerah.
- 5) Koordinasi dengan pemerintah provinsi / pemerintah pusat / pemerintah daerah lainnya.
- 6) Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan proporsi 75,88% atau sebesar Rp 4.655.211.059,-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 (menurut Lampiran VI Permendagri 54 tahun 2010) berikut ini (terlampir).

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 7 program,
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan.
3. Pelaksanaan program mencapai 100%.
4. Pelaksanaan kegiatan mencapai 100%.

Secara keseluruhan, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2017 (Belanja Langsung) melalui dana APBD sebesar Rp 60.165.552.000,-. Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2017 telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 54.574.571.944,- atau sebesar 90,71% dari anggaran Belanja Langsung.



Dilihat dari realisasi fisik yang mencapai 100%, maka bila dibandingkan dengan serapan keuangan yang hanya sebesar 90,71% berarti adanya sisa anggaran yang disetorkan ke kas negara/ daerah, maka hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum.

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi, dan perlengkapan serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Biro Umum merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Asisten Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Umum di dukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi serta sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun kelembagaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. **Bagian Tata Usaha**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu :

- a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Pimpinan;
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro.

2. **Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda;
- b) Sub Bagian Penatausahaan Aset Setda;
- c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda.



3. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga Kantor;
- c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan Aset Setda.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh :

a. Jumlah Pegawai / Personil.

PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
126	118	244

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.

PNS				Tenaga Kontrak	Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		
5	52	61	8	118	244

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Fungsional Umum	Jumlah
-	3	9	114	126

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D-3)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
8	31	5	75	5	2	126

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan.

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
17	4	2	23

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD seperti tabel 2.2. (terlampir).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output yang dihasilkan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan melalui Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari Renstra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun strategi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Biro Umum dalam pengelolaan aset Setda.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
- c. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Biro Umum.
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran.



- e. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada.
- f. Menerapkan *reward and punishment* dengan standar kriteria kinerja yang pasti.
- g. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
- h. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi yang akurat (*data base*) sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2019 telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Pada rancangan akhir RKPD ini tidak banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi program/ kegiatan maupun lokasi, melainkan hanya ada pengurangan/ penyesuaian anggaran sesuai PPAS yang telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga telah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan anggaran sehingga perubahan atas apa yang telah ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, dan perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.



Sehingga sesuai dengan kewenangannya, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelaahan dan kompilasi terhadap usulan program dan kegiatan dari masing masing Bagian yang ada di Biro Umum dan melalui mekanisme analisa kebutuhan barang dan jasa yang di dapat dari usulan Biro-Biro dilingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dan acuan dalam penentuan prioritas penyusunan Rencana Kerja.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehingga pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan Mendorong partisipasi masyarakat

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan



keuangan, perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum.

3.2.1. Tujuan.

Sesuai Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujutnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
- b. Terjaminnya kepemilikan barang milik daerah melalui inventarisasi aset secara berkala.
- c. Terjaminnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang prima.

Tujuan tersebut di atas adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku unit kerja SKPD diharapkan mampu menjalankan tupoksinya.

3.2.2. Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya fungsi pelayanan ketatausahaan dan administrasi kantor lingkup Setda secara profesional, terdiri dari :
 1. Persentase surat yang dapat ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan.
 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disampaikan tepat waktu.
 3. Persentase SPM yang dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja.
- b. Meningkatnya pelayanan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana kantor yang terdiri dari :
 1. Persentase layanan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi.
 2. Jumlah layanan penggunaan ruang rapat / aula pertemuan.



- c. Terpenuhinya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah secara optimal, terdiri dari :
 - 1. Jumlah fasilitas pelaksanaan kunjungan / insfeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/ Kota.
 - 2. Jumlah fasilitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - 3. Persentase pelayanan jamuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam rangka audiensi / dialog dengan tokoh masyarakat dan penerimaan kunjungan tamu pemda yang terfasilitasi.
- d. Tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan fungsional terdiri dari :
 - 1. Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat terlihat pada tabel 3.1 (terlampir).



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2019.

Pada Tahun 2019, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan menjalankan program dan kegiatan antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyedia jasa surat menyurat
2. Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5. Penyedia jasa jaminan barang milik daerah
6. Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
7. Penyedia jasa administrasi keuangan
8. Penyedia jasa kebersihan kantor
9. Pemeliharaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Penyediaan alat tulis kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
16. Pembinaan non PNS

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan meubelair
5. Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan
6. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan
8. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir
12. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan



13. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

F. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri.
3. Rapat koordinasi dengan unsur muspida
4. Kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
5. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
6. Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

G. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Barang Daerah.

1. Pengelolaan inventaris barang daerah
2. Penyusunan KIB BI dan KIR

4.2. Sumber Pendanaan.

Untuk mendukung berbagai program tersebut diatas, masukan yang digunakan adalah antara lain sumber daya manusia yang dimiliki Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, teknologi serta sumber pendanaan yang digunakan diperoleh dari APBD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA, dan DPA-SKPD tahun anggaran 2018 sebagai manifestasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Renja SKPD tahun 2019 ini juga sebagai bahan acuan pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SKPD tahun anggaran 2018.

Demikian Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini disusun dan dibuat, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PLT. KEPALA BIRO UMUM,

AGUS PRAMONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610817 198603 1 034



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM TAHUN 2017	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Tahun 2017.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.	15
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... ..	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum	16
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	18
4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2019.....	18
4.2 Sumber Pendanaan	19
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Sampai Dengan Tahun 2017	
2. Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum	
3. Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	
4. Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Biro				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase surat/naskah dinas yg dapat ditindaklanjuti dalam 1 hari kerja / batas waktu yang ditentukan	-	-	100%	100%	100%	100%	80.00%	95.00%	100%	100%	
2	Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang dapat diselesaikan maksimal 3 hari	-	-	100%	100%	100%	100%	85.00%	90.00%	100%	100%	
3	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disampaikan tepat waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4	Persentase kendaraan operasional yang laik jalan / terpenuhi	-	-	100%	100%	100%	100%	85.00%	90.00%	100%	100%	
5	Persentase gedung / bangunan kantor yang kondisinya baik	-	-	100%	100%	100%	100%	85.00%	90.00%	100%	100%	
6	Jumlah pelaksanaan kunjungan / inspeksi KDH / wakil KDH ke daerah /Kabupaten kota	-	-	100%	100%	100%	100%	85.00%	80.00%	100%	100%	
7	Jumlah Kegiatan koordinasi KDH / wakil KDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lainnya	-	-	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	
8	Persentase pelayanan jamuan KDH/ wakil KDH dalam rangka audiensi/dialok dengan tokoh masyarakat dan penerimaan kunjungan tamu pemda yang terfasilitasi.	-	-	100%	100%	100%	100%	85.00%	98.00%	100%	100%	
9	Jumlah Dokumen penatausahaan aset / barang milik daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	

Pit. KEPALA BIRO UMUM,

AGUS PRAMONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 19610817 198603 1 034

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM S.D. TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIRO UMUM
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RENSTRA SKPD s.d. Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan operasional kerja yang didukung peralatan kerja, lingkungan kerja yang semakin meningkat	109,785,751,086	15,149,609,963	16,615,982,775	15,146,466,889	91.16	22,715,421,450	-	-	
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas/ barang/ paket	395,000,000	24,524,500	62,000,000	46,167,500	74.46	62,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pasokan listrik, telepon, dan air bersih	24,830,064,764	3,605,890,536	3,953,756,000	3,633,211,821	91.89	4,315,200,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,137,764,700	376,860,000	500,000,000	319,418,000	63.88	450,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Bantuan kesehatan PNS	1,400,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1,500,000,000	147,060,424	218,468,085	185,534,731	84.93	802,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional selama 1 tahun	1,491,100,000	126,310,345	205,500,000	106,795,300	51.97	250,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	6,249,347,169	736,529,100	1,136,660,850	1,038,840,400	91.39	1,549,180,500	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan taman/ halaman lingkungan Kantor Gubernur	6,655,918,543	1,181,495,115	1,087,039,540	952,552,964	87.63	1,972,637,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		988,500,000	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1,143,400,000	199,129,300	198,500,000.00	198,357,250	99.93	210,600,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan, blanko-blanko administrasi perkantoran	729,650,000	77,735,500	219,000,000.00	217,216,000	99.19	640,950,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	2,702,900,000	200,776,600	295,500,000.00	290,348,000	98.26	400,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan penerimaan tamu	8,843,027,847	1,572,265,888	1,614,458,300.00	1,163,582,300	72.07	1,861,862,300	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya hotel, sewa tempat, mobilitas darat, air dan udara	11,120,698,560	1,560,091,635	1,925,400,000.00	1,920,219,033	99.73	2,351,271,650	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya hotel, sewa tempat, mobilitas darat, air dan udara	8,498,560,388	1,582,575,588	1,730,700,000.00	1,659,769,670	95.90	3,131,000,000	-	-	Biro Umum

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RENSTRA SKPD s.d. Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.1.20.03.01.23	Pembinaan non PNS	Terbantunya penyelesaian tugas-tugas kantor oleh tenaga kontrak (Non PNS)	17,804,081,215	2,477,091,854	3,419,000,000.00	3,414,453,920	99.87	4,668,720,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.32	Penyediaan Jasa Administrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setda	Tersedianya jasa Administrasi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	576,462,900	115,052,250	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.35	Rujukan Berobat PNS		570,000,000	37,805,102	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.52	Penyediaan Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Setda	Tersedianya jasa administrasi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan Sekretariat Daerah	2,629,275,000	490,508,725	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.01.53	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		8,520,000,000	637,907,501	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		300,560,593,035	16,588,098,642	35,803,725,225	33,328,252,747	93.09	89,133,004,666	-	-	
1.20.1.20.03.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan		-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor		100,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan		-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		27,217,000,000	3,043,970,000	3,200,500,000	3,142,352,399	98.18	5,056,155,200	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas KDH/WKDH dan Sekda	8,974,000,000	1,990,972,752	1,812,500,000	1,484,248,484	81.89	2,229,200,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	18,112,230,000	2,483,354,790	4,632,050,000	4,072,940,240	87.93	7,874,950,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair keperluan kantor	11,418,900,000	1,944,699,250	546,500,000	495,100,000	90.59	1,213,500,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan KDH/ WKDH	3,880,800,000	503,834,600	1,612,150,000	1,609,842,212	99.86	1,105,552,500	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	5,254,450,000	966,859,573	702,000,000	697,339,975	99.34	765,750,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dan tersedianya BBM	4,333,520,748	663,904,721	787,800,000	586,625,079	74.46	855,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional dan tersedianya BBM	13,733,906,787	2,052,487,747	1,957,500,610	1,334,698,628	68.18	2,045,955,216	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	1,382,997,500	36,275,490	397,324,000	311,879,600	78.50	439,822,750	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3,459,533,000	618,408,825	476,000,000	444,748,630	93.43	685,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Terpeliharanya Pagar, Halaman, dan tempat Parkir	11,795,500,000	376,205,650	275,037,615	262,360,000	95.39	1,155,550,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Tertatanya lingkungan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur	15,767,783,000	256,114,100	389,250,000	-	-	27,179,410,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	75,044,870,000	1,631,061,144	19,015,113,000	18,886,117,500	99.32	38,527,159,000	-	-	Biro Umum

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RENSTRA SKPD s.d. Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.1.20.03.02.77	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi	Terpeliharanya peralatan sarana komunikasi publik dan sandi	185,102,000	19,950,000	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		4,260,100,000	658,518,000	712,730,000	648,817,958	91.03	1,513,100,000	-	-	
1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS, tenaga kontrak, gubernur dan wakil gubernur	4,260,100,000	658,518,000	712,730,000	648,817,958	91.03	1,513,100,000	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS		295,000,000	14,236,800	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.03.04.03	Pemindahan Tugas PNS	Tersedianya pelayanan pindah tugas PNS di lingkup Setda	295,000,000	14,236,800	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		920,000,000	38,626,800	225,000,000	202,380,409	89.95	480,000,000	-	-	
1.20.1.20.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya diklat, kursus, bimtek, sosialisasi dan rakor bagi PNS lingkup Setda	870,000,000	38,626,800	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dana untuk mengikuti Bimbingan Teknis/Diklat Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	50,000,000	-	225,000,000	202,380,409	89.95	480,000,000	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		1,653,312,125	180,218,897	274,750,000	254,479,350	92.62	490,575,825	-	-	
1.20.1.20.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	689,679,300	75,459,000	195,350,000	178,617,500	91.43	388,760,200	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	185,712,900	16,514,200	49,400,000	46,064,350	93.25	50,000,000	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	372,400,000	47,199,350	30,000,000	29,797,500	99.33	51,815,625	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.06.06	Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA-SKPD	405,519,925	41,046,347	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH		27,077,573,600	3,684,061,080	6,148,100,000	4,665,211,059	75.88	6,829,457,209	-	-	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RENSTRA SKPD s.d. Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.1.20.03.52.03	Inventarisasi Barang Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang daerah di lingkungan Setda	1,771,474,900	211,299,110	-	-	-	-	-	-	Biro Umum
1.20.1.20.03.52.03	penyusunsn KIB BI dan KIR	tersusunnya KIB BI dan KIR	1,771,474,900	-	44,687,450	40,742,450	91.17	300,000,000	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja								87,440,850	-	-	
4.06.4.06.01.8.01	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Terkelolanya arsip aktif dan inaktif	-	-	-	-	-	87,440,850	-	-	Biro Umum
Rata-ata capaian Kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASAI DARI SELURUH PROGRAM			452,813,676,646	37,076,692,422	60,165,548,000	54,574,571,944	90.71	122,015,000,000	-	-	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH (PROGRAM 1 s.d PROGRAM											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :											

Plt. KEPALA BIRO UMUM

AGUS PRAMONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610817 198603 1 034

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				16,070,936,683	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				16,070,936,683	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Terkirimnya surat-surat dinas/barang/paket/dokumen	12 bln	70,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Terkirimnya surat-surat dinas/barang/paket/dokumen	12 bln	70,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Tersedianya pasokan listrik, telepon, internet dan air bersih di lingkungan rujab dan setda prov. Kalteng	12 bln	4,218,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Tersedianya pasokan listrik, telepon, internet dan air bersih di lingkungan rujab dan setda prov. Kalteng	12 bln	4,218,600,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya	525,312,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya	525,312,500	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Palangka Raya	Tersedianya bantuan perawatan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bln	300,000,000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Palangka Raya	Tersedianya bantuan perawatan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bln	300,000,000	
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palangka Raya	Terbayarnya PBB rujab gub, wagub dan sekda 3 unit bangunan	Palangka Raya	300,000,000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palangka Raya	Terbayarnya PBB rujab gub, wagub dan sekda 3 unit bangunan	Palangka Raya	300,000,000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terbayarnya administrasi perpanjangan STNK, KIR kendaraan operasional/dinas 88 unit	Palangka Raya	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terbayarnya administrasi perpanjangan STNK, KIR kendaraan operasional/dinas 88 unit	Palangka Raya	250,000,000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palangka Raya	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	12 Bulan	1,152,112,500	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palangka Raya	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	12 Bulan	1,152,112,500	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa kebersihan taman/halaman di lingkungan kantor gubernur	12 bln	972,486,078	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya jasa kebersihan taman/halaman di lingkungan kantor gubernur	12 bln	972,486,078	
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palangka Raya	Terpeliharanya peralatan pendukung kinerja aparatur	1 tahun	200,000,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palangka Raya	Terpeliharanya peralatan pendukung kinerja aparatur	1 tahun	200,000,000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda prov. Kalteng	12 bln	175,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda prov. Kalteng	12 bln	175,000,000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan, blanko-blank administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan	12 bln	120,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan, blanko-blank administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan	12 bln	120,000,000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	Palangka Raya	500,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	Palangka Raya	500,000,000	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat dan jamuan penerimaan tamu pemda	12 bln	1,217,425,605	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat dan jamuan penerimaan tamu pemda	12 bln	1,217,425,605	
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas luar daerah	12 bln	1,950,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas luar daerah	12 bln	1,950,000,000	

15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	1,275,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Palangka Raya	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	1,275,000,000	
16	Pembinaan non PNS	Palangka Raya	Tersedianya jasa tenaga kontrak (non pns) 120 org	12 bln	2,845,000,000	Pembinaan non PNS	Palangka Raya	Tersedianya jasa tenaga kontrak (non pns) 120 org	12 bln	2,845,000,000	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				27,736,061,087	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				27,736,061,087	
1	Pembangunan Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya pembangunan rujab wagub kalteng	1 unit	-	Pembangunan Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya pembangunan rujab wagub kalteng	1 unit	0	
2	Pembangunan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya convention hall tahap I dan tahap II	-	11,000,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya convention hall tahap I dan tahap II	-	11,000,000,000	
3	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Terjaminnya mobilitas KDH dan WKDH		-	Pengadaan Mobil Jabatan	Palangka Raya	Terjaminnya mobilitas KDH dan WKDH	-	0	
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terjaminnya pengadaan kendaraan dinas lingkup setda prov.kalteng	8 buah	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	Terjaminnya pengadaan kendaraan dinas lingkup setda prov.kalteng	8 buah	0	
5	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Tersedianya pengadaan perlengkapan/peralatan rujab KDH/WKDH	12 bulan	1,250,000,000	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Tersedianya pengadaan perlengkapan/peralatan rujab KDH/WKDH	12 bulan	1,250,000,000	
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	12 bulan	4,000,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	12 bulan	4,000,000,000	
7	Pengadaan Meubelair	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan meja rapat, meja makan, meja partisi, taplak meja, karpet, kursi tamu, kursi rapat, lemari dokumen dan meja kerja	12 bulan	2,000,000,000	Pengadaan Meubelair	Palangka Raya	Terlaksananya pengadaan meja rapat, meja makan, meja partisi, taplak meja, karpet, kursi tamu, kursi rapat, lemari dokumen dan meja kerja	12 bulan	2,000,000,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup rujab	12 bulan	490,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup rujab	12 bulan	490,000,000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup setda	12 bulan	850,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palangka Raya	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup setda	12 bulan	850,000,000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku	12 bulan	663,956,699	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku	12 bulan	663,956,699	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 88 unit kendaraan dinas operasional dan BBM solar serta pertamax	12 bulan	2,097,104,388	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 88 unit kendaraan dinas operasional dan BBM solar serta pertamax	12 bulan	2,097,104,388	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Terpeliharanya perlengkapan rujab dinas	12 bulan	185,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Palangka Raya	Terpeliharanya perlengkapan rujab dinas	12 bulan	185,000,000	

13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terpeliharannya peralatan gedung kantor	Palangka Raya	700,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Palangka Raya	Terpeliharannya peralatan gedung kantor	Palangka Raya	700,000,000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Palangka Raya	Terlaksananya rehab air mancur dan taman bawah tangga sayab barat dan pembuatan taman dan halaman	Palangka Raya	3,000,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Palangka Raya	Terlaksananya rehab air mancur dan taman bawah tangga sayab barat dan pembuatan taman dan halaman	Palangka Raya	3,000,000,000	
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya rehab istana isen mulang dan rujab gub kalteng	1 tahun	500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Palangka Raya	Terlaksananya rehab istana isen mulang dan rujab gub kalteng	1 tahun	500,000,000	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya rehab kantor gub sayap timur, mushola, ruang kerja gubernur, lobby gedung utama,	-	1,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Palangka Raya	Terlaksananya rehab kantor gub sayap timur, mushola, ruang kerja gubernur, lobby gedung utama,	0	1,000,000,000	
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/aula	Palangka Raya	Terlaksananya rehab AJT	1 unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/aula	Palangka Raya	Terlaksananya rehab AJT	1 unit	0	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sarana Komunikasi Publik Sandi			-	-				-	-	
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					713,200,000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					713,200,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH, PNS dan tenaga kontrak dilingkup setda	3 paket	713,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH, PNS dan tenaga kontrak dilingkup setda	3 paket	713,200,000	
IV. PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS					-	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS					-
1	Pemindahan Tugas PNS	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan pindah tugas pns dilingkup setda	-	-	Pemindahan Tugas PNS	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan pindah tugas pns dilingkup setda	-	-	
V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					200,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					200,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Palangka Raya	Tersedianya biaya diklat, kursus dan bimtek bagi pns lingkup setda	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Palangka Raya	Tersedianya biaya diklat, kursus dan bimtek bagi pns lingkup setda	-	-	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Tersedianya dana untuk mengikuti bimtek/diklat implementasi peraturan perundang-undangan	1 thn	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Tersedianya dana untuk mengikuti bimtek/diklat implementasi peraturan perundang-undangan	1 thn	200,000,000	
VI. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					185,125,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					185,125,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen	12 bulan	130,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen	12 bulan	130,000,000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen	12 bulan	22,050,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen	12 bulan	22,050,000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen	12 bulan	33,075,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen	12 bulan	33,075,000	
4	Penyusunan RKA-SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen RKA dan RKAP-SKPD 2 dokumen	-	-	Penyusunan RKA-SKPD	Palangka Raya	Tersusunnya dokumen RKA dan RKAP-SKPD 2 dokumen	-	-	

VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH				550,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH					550,000,000	
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya pengelolaan inventaris barang daerah	12 bulan	400,000,000	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya pengelolaan inventaris barang daerah	12 bulan	400,000,000		
2	Penyusunan KIB BI dan KIR	kab/kota	Tercatatnya inventaris aset barang daerah	12 bulan	150,000,000	Penyusunan KIB BI dan KIR	kab/kota	Tercatatnya inventaris aset barang daerah	12 bulan	150,000,000		
VIII.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				-	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI					-	
1	Monitoring, evaluasi, pelaporan, sandi dan telekomunikasi	Palangka Raya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi 1 dokumen	-	-	Monitoring, evaluasi, pelaporan, sandi dan telekomunikasi	Palangka Raya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi 1 dokumen	-	-		
IX.	PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				4,300,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH					4,300,000,000	
1	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Palangka Raya	Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	12 bulan	600,000,000	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Palangka Raya	Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	12 bulan	600,000,000		
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Palangka Raya	Terjaminnya pelayanan tamu-tamu pemda	12 bulan	500,000,000	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Palangka Raya	Terjaminnya pelayanan tamu-tamu pemda	12 bulan	500,000,000		
3	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Palangka Raya	Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA	12 bln	125,000,000	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Palangka Raya	Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA	12 bln	125,000,000		
4	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	12 bln	800,000,000	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	12 bln	800,000,000		
5	Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Palangka Raya	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 bln	1,000,000,000	Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Palangka Raya	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 bln	1,000,000,000		
6	Pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bln	1,275,000,000	Pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Palangka Raya	Tersedianya pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bln	1,275,000,000		
X.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				-	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					-	
1	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Tersedianya administrasi kepegawaian dilingkup setda prov.kalteng	-	-	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Tersedianya administrasi kepegawaian dilingkup setda prov.kalteng	-	-		
Jumlah					49,755,322,770	Jumlah					49,755,322,770	

Pit. KEPALA BIRO UMUM

AGUS PRAMONO,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610817 198603 1 034

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2018
dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.06 - 4.6.0108 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				22,715,421,450				17,232,836,683
4.06 - 4.6.0108 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas/barang/paket/dokumen	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	62,000,000	APBD		1 thn	70,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pasokan listrik, telepon, internet dan air bersih dilingkungan rujab dan setda prov. Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	4,315,200,000	APBD		1 thn	4,218,600,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	450,000,000	APBD		1 thn	525,312,500
4.06 - 4.6.0108 - 1.4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya bantuan perawatan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	2 org	50,000,000	APBD		2 org	300,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya PBB rujab gub, wagub dan sekda 3 unit bangunan	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit	802,000,000	APBD		1 unit	802,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya administrasi perpanjangan STNK, KIR kendaraan operasional/dinas 88 unit	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit	250,000,000	APBD		1 unit	250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	1,549,180,500	APBD		1 thn	1,152,112,500
4.06 - 4.6.0108 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan taman/halaman dilingkungan kantor gubernur	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	1,972,637,000	APBD		1 thn	972,486,078
4.06 - 4.6.0108 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor keperluan pimpinan dan biro umum setda prov. Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	210,600,000	APBD		1 thn	175,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan pimpinan dan biro umum setda prov. Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	640,950,000	APBD		1 thn	120,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	400,000,000	APBD		1 thn	500,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat dan jamuan penerimaan tamu tamu	LUAR PROVINSI	1 thn	1,861,862,300	APBD		1 thn	1,817,425,605
4.06 - 4.6.0108 - 1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas luar daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	2,351,271,650	APBD		1 thn	2,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya hotel, sewa tempat dan mobilitas dan uang saku perjalanan dinas dalam daerah	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	3,131,000,000	APBD		1 thn	1,500,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 1.23	Pembinaan non PNS	Tersedianya jasa tenaga kontrak (non pns) 120 org	KOTA PALANGKA RAYA	1 org	4,668,720,000	APBD		1 org	2,829,900,000

4.06 - 4.6.0108 - 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				89,133,004,666				70,051,061,087
4.06 - 4.6.0108 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaminnya pengadaan kendaraan dinas lingkup setda prov kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	5,056,155,200	APBD		1 thn	1,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya pengadaan perlengkapan/peralatan rujab KDH/WKDH	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	2,229,200,000	APBD		1 thn	1,500,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	7,874,950,000	APBD		1 thn	4,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.10	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya pengadaan meja rapat, meja makan, meja partisi, taplak meja, karpet, kursi tamu, kursi rapat, lemari dokumen dan meja kerja	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	1,213,500,000	APBD		1 thn	2,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup rujab	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	1,105,552,500	APBD		1 thn	490,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tertatanya gedung, taman dan halaman lingkup setda	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	765,750,000	APBD		1 thn	850,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 16 unit kendaraan dinas jabatan dan BRM solar serta pertamax	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit	855,000,000	APBD		1 unit	663,956,699
4.06 - 4.6.0108 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan (service berkala, penggantian suku cadang, ban, accu, minyak pelumas) 88 unit kendaraan dinas operasional dan BRM solar serta	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	2,045,955,216	APBD		1 thn	2,097,104,388
4.06 - 4.6.0108 - 2.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya perlengkapan rujab dinas	KOTA PALANGKA RAYA	1 thn	439,822,750	APBD		1 thn	250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharannya peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit bangunan	685,000,000	APBD		1 unit bangunan	700,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Terlaksananya rehab air mancur dan taman bawah tangga sayab barat dan pembuatan taman dan halaman	KOTA PALANGKA RAYA	1 unit bangunan	1,155,550,000	APBD		1 unit bangunan	3,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terlaksananya rehab istana isen mulang dan rujab gub kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	27,179,410,000	APBD		1 tahun	500,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab kantor gub sayap timur, mushola, ruang kerja gubernur, lobby gedung utama, gedung biro kesra dan	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	38,527,159,000	APBD		1 tahun	53,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1,513,100,000				713,200,000
4.06 - 4.6.008 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, PNS, dan Tenaga Kontrak lingkup Setda Prov. Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	3 paket	1,513,100,000	APBD		3 paket	713,200,000
4.06 - 4.6.0108 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				480,000,000				250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dana untuk mengikuti bimtek/diklat implementasi peraturan perundang-undangan	LUAR PROVINSI	1 thn	480,000,000	APBD		1 thn	250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				490,575,825				185,125,000
4.06 - 4.6.0108 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2	KOTA PALANGKA RAYA	5 dokumen	388,760,200	APBD		5 dokumen	130,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen	KOTA PALANGKA RAYA	2 dokumen	50,000,000	APBD		2 dokumen	22,050,000
4.06 - 4.6.0108 - 6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	51,815,625	APBD		1 dokumen	33,075,000
4.06 - 4.6.0108 - 8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				766,000,000				700,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 8.1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Terkelolanya barang inventaris lingkup Setda secara efektif dan fungsional	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	466,000,000	APBD		1 tahun	400,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 8.2	Penyusunan KIB BI dan KIR	Tersedianya dokumen KIB, Buku Inventaris dan KIR Setda	KOTA PALANGKA RAYA	3 dokumen	300,000,000	APBD		3 dokumen	300,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				6,829,457,209				5,575,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terjalinnya komunikasi antara pemprov dengan tokoh-tokoh masyarakat/ ormas dengan baik	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	1,550,000,000	APBD		1 thn	1,000,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan kunjungan tamu-tamu pemda di rumah jabatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	1,025,000,000	APBD		1 thn	700,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27.3	Rapat koordinasi dengan unsur muspida	Meningkatnya koordinasi unsur FKPD	LUAR PROVINSI	1 thn	300,000,000	APBD		1 thn	125,000,000

4.06 - 4.6.0108 - 27.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH ke Kabupaten/kota di wilayah kalimantan tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	1,350,454,334	APBD		1 thn	1,250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	1,000,000,000	APBD		1 thn	1,250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27.8	Pelayanan kerumahtangaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terjaminnya pelayanan kerumahtangaan KDH/WKDH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	1,604,002,875	APBD		1 thn	1,250,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 87	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Lingkungan Biro Umum				87,440,850				100,000,000
4.06 - 4.6.0108 - 27.1	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Terkelolanya arsip aktif dan inaktif Biro Umum	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 thn	87,440,850	APBD		1 thn	100,000,000
Jumlah					122,015,000,000.00				94,807,222,770.00

Plt. KEPALA BIRO UMUM

AGUD PRAMONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610817 198603 1 034